

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KELURAHAN MARTUBUNG

Tomi Jaffisa

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa

tomi@dharmawangsa.ac.id

RINGKASAN - PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah menjadi acuan hukum bagi PNS dan dijadikan dasar untuk mengatur aparatur Negara menjadi baik dan benar. Di lingkungan Kelurahan Martubung beberapa kali terjadi pelanggaran berkaitannya dengan pelanggaran disiplin yaitu datang terlambat disaat jam masuk kerja dan ketidakhadiran tanpa pemberitahuan pada jam kerja dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu penulis merumuskan bagaimana pelaksanaan peraturan Disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Kelurahan Martubung. Metode penelitian yang dilakukan adalah Metode diskriptif, yaitu menganalisa, menginterpretasikan data tersebut sehingga menghasilkan jawaban dan gambaran terhadap implementasi peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di kelurahan Martubung. Peran aparatur negara semakin penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena pegawai negeri merupakan aparatur Negara yang menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Berjalan baiknya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan tidak terlepas keikutsertaan aparatur negara. Faktor terjadinya pelanggaran disiplin yaitu faktor internal dimana faktor ekonomi dan keluarga, kesadaran yang kurang dan aparatur negara yang kurang memahami perundang-undangan yang berlaku, terutama PP Nomor 53 Tahun 2010, kesempatan yang banyak dan kerjaan yang sedikit .

Kata Kunci : Implementasi, Disiplin, PP No. 53

PENDAHULUAN

Keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan nasional adalah dipengaruhi aparatur pemerintah. Dengan kata lain keberhasilan pemerintah dan pembangunan banyak tergantung dari pada kemauan dan kemampuan pegawai negeri. Sehingga kedudukan dan

tugas pegawai negeri, merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional.

Melakukan kegiatan pembinaan terhadap aparatur pemerintah baik tingkat pusat dan daerah, BUMN dan BUMD sebagai aparatur Negara perlu dilakukan secara rutin, sehingga dapat meningkatkan keahlian dan ketaatannya. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan, maka dikeluarkan peraturan tentang disiplin pegawai negeri yaitu melalui PP Nomor 53 tahun 2010. Peraturan pemerintah tentang disiplin PNS ini antar lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

Keahlian SDM itu sendiri dapat terbentuk karakter pribadi dalam meningkatkan kinerjanya di suatu instansi khususnya pemerintahan. Disiplin yang terbaik adalah disiplin diri karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan. Pengaruh disiplin dalam meningkatkan kinerja pegawai sangatlah penting pada era globalisasi dan otonomi daerah saat ini. Hal ini dapat terlihat dari kebiasaan pegawai yang suka terlambat masuk jam kerja, membaca koran saat jam kerja, kurang disiplin bahkan ada sebagian pegawai yang mencari objek diluar pada saat jam kerja tertentu. Pada sisi yang lain menyatakan bahwa aparatur Negara yang sebagianya sebagai pelayanan masyarakat justru menjadi penghambat terhadap urusan masyarakat dengan memanfaatkan jalur birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Peraturan ini menjadi ancaman bagi pegawai negeri di lembaga pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas, kewajiban serta aturan – aturan yang harus di patuhi sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Ialah suatu kegiatan dari sebuah agenda yang sudah direncanakan secara teliti. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah dianggap fix. Guntur Setiawan berpendapat (2004 : 39), “ Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan dan juga dapat diartikan implementasi adalah bukan hanya kegiatan, tapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara serius dengan mengikuti acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan tentang disiplin PNS ini antar lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat diberikan kepada PNS yang telah terbukti melakukan kesalahan. Sanksi hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang melakukan pelanggaran, sehingga yang bersangkutan mempunyai rasa penyesalan dan tidak mengulangi lagi dan mampu memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam peraturan ini secara jelas tertulis bentuk hukuman disiplin yang dapat dikenakan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Ini bermaksud sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam memberikan sanksi hukuman disiplin. Adanya batasan bagi pejabat yang berwenang untuk menghukum yang melanggar aturan sudah ditentukan dalam peraturan ini. Setelah disahkan peraturan tentang disiplin pegawai negeri diharapkan dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Kedisiplinan merupakan menjadi hal penting bagi suksesnya pelaksanaan pekerjaan yang dipercayakan tersebut.

3. Pengertian Disiplin.

Secara umum disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan atau tunduk terhadap semua aturan atau ketentuan yang berlaku atau dapat juga diartikan

sebagai keseriusan dalam bertindak atau berperilaku. Membuat disiplin itu perlu adanya aturan atau ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewajibkan orang lain untuk disiplin, akan tetapi dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam bertindak, berperilaku atau bersikap yang diharapkan dapat menjadi suatu kebiasaan atau suatu yang wajar dengan senang hati.

Bejo Siswanto berpendapat (1997 : 287) Disiplin kerja adalah adanya saling menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup melaksanakannya dan berani untuk menerima hukuman apabila melakukan pelanggaran tugas dan wewenang yang di berikan kepadanya.

Dari ulasan di atas disiplin merupakan sikap tertib dari orang lain dengan menunjukkan kepatuhan atau ketaatan kepada peraturan atau ketentuan yang telah ada dengan senang hati, tanpa paksaan. Dan disiplin merupakan suatu tingkah laku perorangan atau kelompok yang sesuai dengan peraturan-peraturan baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang menekankan kepada kepatuhan maupun inisiatif. Jadi disiplin timbul sebagai dari bermacam-macam bentuk perjanjian yang menurut kepatuhan, ketaatan dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Kedua metode yang digunakan, adalah metode deduktif yaitu menganalisa data dengan berpusat dari data yang bersifat umum menuju keadaan khusus. Metode yang kedua yaitu metode induktif yang bertolak belakang dari metode deduktif untuk menganalisa data dengan berpusat dari data yang bersifat khusus menuju keadaan umum. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan terhadap kajian perpustakaan (*Library Research*) dan pengamatan lapangan (*Field Research*).

Saat ini jenis data yang dikaitkan dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara mandiri atau dengan kata lain diambil langsung dari kantor Kelurahan martubung. Data sekunder ialah data yang digunakan penulis dari bahan perpustakaan misalnya dengan memahami buku atau bahkan hasil mengikuti kuliah. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah teknik observasi dengan melakukan melihat secara langsung terhadap objek penelitian yaitu instansi terkait, dengan wawancara kepada pemimpin dan masyarakat serta melalui kajian kepustakaan dengan pengumpulan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah diadakan penelitian di lapangan melalui penyebaran kuisioner, maka diperoleh data mengenai keadaan responden. Data hasil penyebaran kuesioner yang sudah diolah peneliti menunjukkan bahwa para pegawai kelurahan bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur pemerintah dan juga kedudukan dan fungsi pegawai negeri di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan agar kita mengetahui implementasi PP Nomor. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di kelurahan Martubung.

Kedisiplinan dituntut kehadirannya karena tanpa disiplin nantinya akan timbul berbagai macam cara yang mengancam dilaksanakannya tujuan yang akan diraih. Apalagi dalam bingkai mewujudkan pemerintahan yang baik masih sangat sulit, salah satu di antaranya faktor kedisiplinan berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuan sebagian besar ditentukan oleh kinerja disiplin pegawai. Pegawai negeri harus sadar dan menganggap sifat disiplin kerja tersebut sebagai kewajiban dan tanggungjawabnya. Sebuah organisasi akan terlihat berhasil, karena ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) nya. Keahlian sumber daya manusia itu sendiri dapat terbentuk karakter pribadi dalam menunjang kinerjanya di suatu lembaga khususnya pemerintahan. Disiplin yang terbaik adalah disiplin diri karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan. Pengaruh disiplin dalam meningkatkan kinerja pegawai sangatlah penting pada era globalisasi dan otonomi daerah saat ini.

Diberlakukannya aturan tentang disiplin pegawai negeri adanya harapan lebih tertib dan menjalankan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada

mereka. Disiplinan hal penting bagi berhasilnya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kelurahan Martubung dilakukan mulai dari pimpinan hingga pada staf yang paling rendah pangkat dan golongannya, sehingga diperoleh kinerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Martubung telah di laksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan dan dengan adanya Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Martubung membuat tingkat kehadiran pegawai semakin baik. Adanya faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu : perbuatan pegawai, tingkah laku pemimpin, gratifikasi, lingkungan, dan ketegasan sanksi pelanggaran tersebut.

DAFTARPUSTAKA

- Darmawan, Didi. **Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi, Pena Semesta , Surabaya. 2013**
- Fernanda, Desi. *Etika Organisasi Pemerintah*, LAN, Jakarta. 2009
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta. 1993
- Suhady, Idup. *Kepemerintahan Yang Baik*, LAN, Jakarta. 2009
- Suradji. *Manajemen Kepegawaian Negara*, LAN, Jakarta. 2009